**KEDUDUKAN HUKUM PELAKU PERINTANGAN PROSES PERADILAN
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kartono¹, Bambang Wiyono², Lukman Khakim³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

dosen01490@unpam.ac.id¹, bambang_wiyono@yahoo.com², lukmankhakim1991@gmail.com³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum pelaku perintangan proses peradilan (Obstruction of Justice) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, analisis yang digunakan adalah Putusan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/Tpk/2022/PN.Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan juga pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), kemudian penelitian ini juga menggunakan kasus (*Case Study*) untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar penilaian dalam perbuatan perintangan proses peradilan (*Obstruction of Justice*) pada perkara tersebut sudah memenuhi unsur keadilan atau belum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil dua pokok permasalahan yang dapat disimpulkan, *Pertama*, bahwa penerapan *Obstruction of Justice* memiliki arti kepada seseorang yang memberikan ide, nasihat, pendapat, pertimbangan, saran atau bahkan perintah kepada pelaku tindak pidana. Kedudukan hukum advokat yang diduga melakukan perintangan proses peradilan (*Obstruction of Justice*) jika perbuatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan tugas profesinya dan tidak didasari oleh Iktikad Baik, hal tersebut didasari pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Hak Imunitas Advokat. *Kedua*, pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut memberikan putusan yang kurang tepat dan belum memenuhi unsur keadilan. Dikarenakan tidak adanya kejelasan atau batasan-batasan perihal tindakan apa saja yang termasuk dalam perintangan proses peradilan (*obstruction of justice*) Hal tersebut menghilangkan makna tujuan filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, *Obstruction of Justice*, Keadilan

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the legal position of the perpetrator of obstruction of justice in the criminal act of corruption based on Article 21 of Law No. 31 of 1999, the analysis used is the Decision of Case Number 3/Pid.Sus/Tpk/2022/PN.Jmb. The research method used is Normative Juridical, using a conceptual approach and also a statutory approach, then this research also uses a case (Case Study) to find out what legal considerations are used as the basis for judgment in the act of obstruction of the judicial process (Obstruction of Justice) in the case has fulfilled the elements of justice or not. Based on this research, the results of two main problems can be concluded, First, that the application of Obstruction of

Justice means to someone who provides ideas, advice, opinions, considerations, suggestions or even orders to the perpetrator of a criminal offense. The legal position of advocates who are suspected of obstructing the judicial process (Obstruction of Justice) if the actions taken are not related to their professional duties and are not based on Good Faith, this is based on Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocate Immunity Rights. Second, the Judge's consideration in the case provided an incorrect decision and did not fulfill the elements of justice. Due to the absence of clarity or boundaries regarding what actions are included in obstruction of justice, this eliminates the meaning of the philosophical purpose of the establishment of Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption.
Keywords: Corruption Crime, Obstruction of Justice, Justice

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa juga tunduk kepada hukum tersebut.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara tak terkecuali siapapun harus tunduk dan terikat oleh hukum.

Seiring dengan adanya perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, tindak kejahatan pun semakin meningkat. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini terus meningkat dan memperhatikan adalah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang dilakukan oleh orang atau suatu korporasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai– nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.²Masalah korupsi

¹ Sajipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

² Allivia Putri Gandini, “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018), hlm. 1.

bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.³

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan-perbuatan menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi kerap dilakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 21, 22, 23, 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan

³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 2.

menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan criminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”.

Dalam Pasal 21 UU Tipikor: *“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari Advokat sebagai salah satu yang terjun langsung menangani kasus korupsi juga terkena dampak dari aturan *Obstruction of Justice*, Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Begitulah bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU Advokat”). Selain itu Advokat juga merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga perlindungan hukum seorang Advokat dalam menjalankan fungsi dan perannya tersebut menjadi sebuah keharusan (*mandatory*) khususnya yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung dari pihak lainnya yang dapat mengganggu proses pembelaan Advokat terhadap Kliennya. Bahwa dalam UU Advokat diatur mengenai perlindungan bagi Advokat untuk dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan/atau tuntutan baik Perdata maupun Pidana baik didalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan dalam rangka menjalankan tugas profesinya, hal ini tercermin secara jelas dalam Pasal 16 UU Advokat *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, atau biasa disebut secara umum sebagai Hak Imunitas Advokat. Namun demikian,

dengan adanya hakim unitas tersebut tidak serta merta berarti advokat kebal hukum. Karena apabila advokat melakukan dugaan pelanggaran dan atau bahkan tindak pidana, setidaknya ada proses hukum yang tetap dilakukan bagi pelanggaran dan/atau tindak pidana tersebut secara bertingkat, yang bisa saja melalui Dewan Kehormatan untuk menentukan benar atau tidaknya pelanggaran yang ditujukan kepada advokat yang bersangkutan atau penegak hukum lainnya yang menangani atas terjadinya dugaan tindak pidana.

Ada beberapa kasus Advokat yang tersangkut *Obstruction Of Justice* salah satunya adalah Advokat ternama yaitu Lucas yang divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Lucas juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Lucas terbukti menghalangi proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Walau akhirnya Lucas bias bebas karena Peninjauan Kembali yang diajukan dikabulkan oleh MA. Dan kasus Fredrich Yunadi sebagai kuasa hukum setya novanto sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Yang akhirnya divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp500.000.000,- subsider 5 bulan kurungan. adapun delik atau cara Fredrich menghalang-halangi proses hukum (penyidikan) yang di lakukan oleh Penyidik KPK saat itu adalah dengan cara Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap suami Desti Astriani Tagor.

Kemudian kasus Advokat terbaru di tahun 2022 Tengku Ardiansyah adalah terpidana kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Tanjung Jabung Timur. Tengku Ardiansyah ditangkap pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Tengku Ardiansyah adalah kuasa hukum sekretaris KPU Tanjabtim yang juga jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada Tanjung Jabung Timur tahun 2020. Advokat Tengku Ardiansyah dihukum 3 tahun penjara karena menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan. Putusan itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi dan dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT)

Jambi. Satu perkara yang menjerat Tengku Ardiansyah sebagai tersangka, karena dirinya menghalang-halangi proses penyidikan pihak Kejari Tanjung Jabung Timur, Terutama saat pemeriksaan saksi-saksi. Di mana Tengku Ardiansyah berperan mengatur skenario, agar para saksi tidak hadir saat pemanggilan para saksi untuk pemeriksaan, Yakni, mulai dari menghalangi, tindakan tidak sopan, dan juga upaya membawa saksi saat pemeriksaan berlangsung.

Berkaca dari beberapa kasus Advokat tersebut, sejumlah advokat mengajukan uji materiil Pasal 21 UU Tipikor. Perkara tersebut terbagi menjadi dua permohonan, yakni Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Khaeruddin serta Barisan Advokat Bersatu yang merupakan Pemohon Nomor 8/PUU-XVI/2018. Dalam permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tersebut, Pemohon menegaskan UU Tipikor tersebut tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir. Hal ini dikarenakan tidak adanya keseragaman pemaknaan yang jelas lagi pasti terkait tolak ukur seorang advokat dalam melakukan pembelaan kepadak lien, khususnya terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Menurut pemohon pasal *a quo* telah bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 karena Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Kemudian kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tersebut memerlukan advokat yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh UU demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Terhadap profesi advokat. Terhadap permohonan kedua perkara, Hakim Konstitusi memberikan catatan perlunya Pemohon Perkara 7/PUU-XVI/2018 untuk memperkuat dasar pada petitum yang menginginkan pasal *a quo* inkonstitusional. Dengan alasan mengaitkan proses etik dengan hukum adalah dua hal yang terpisah. Sehingga dasar petitum inkonstitusional bersyaratnya belum terlihat dasar dalilnya.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka selanjutnya Peneliti bermaksud untuk menyusun penelitian yang berjudul **Kedudukan Hukum Pelaku Perintangan Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Analisis Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jmb).**

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau research questions atau disebut juga *research problem*, memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri, ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. maka Peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Pelaku Perintang Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*) dalam Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 3/Pid.Sus/Tpk/2022/PN.Jmb dalam memenuhi unsur keadilan?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dipergunakan. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan literatur.⁴ Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (berpikir penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis dengan cara kualitatif yaitu itu mengacu terhadap norma hukum serta regulasi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengadakan penelitian perlu adanya metode atau pendekatan penelitian.⁵ Dari definisi konsep tersebut bisa diartikan bahwa diperlukan sebuah data yang berbentuk deskripsi serta menghendaki arti yang berbeda dari bahan hukum yang didapat. Jenis penelitian hukum normatif bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan.⁶ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

⁴ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm. 52.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 300.

a. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis Data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data kualitatif ialah data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk angka. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.

b. Sumber Data

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian maka diperlukan sarana yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder dan tersier sebagai pendukung.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Baku Primer

Norma hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar merupakan bahan hukum primer pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya:

a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji juga dipergunakan sebagai data primer. Untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah dan teoritis maka selanjutnya bahan hukum primer tersebut dibandingkan, dikembangkan, dianalisis dan diuji. Selanjutnya semuanya dihubungkan lalu dipergunakan untuk mengembangkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang telah ada maka diperlukan bahan hukum sekunder. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang ada. Yang termasuk dari bahan hukum sekunder adalah karya tulis ilmiah para ahli dan sarjana yang berupa literatur guna melengkapi,

membantu dan mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti. Selain itu yang termasuk bahan hukum sekunder adalah jurnal hukum, artikel hukum dan buku. Yang memuat data penunjang dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendalami undang-undang dan buku hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang peneliti angkat. Selanjutnya data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis normatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis normatif dilakukan guna mendapatkan gambaran singkat berdasarkan data yang berbentuk perundang-undangan yang sudah dikaitkan dengan masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berurutan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat lebih khusus inilah yang menjadi topic dalam pembahasan penelitian ini.

Analisis bahan hukum deduktif adalah cara yang dipergunakan dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini. Analisis bahan hukum deduktif adalah melakukan analisis terhadap kumpulan data yang diperoleh dengan seperangkat data lain secara sistematis lalu dikombinasikan dengan pendapat para sarjana yang ada kaitanya yang digunakan sebagai komparatif, lebih lengkap dalam penelitian hukum adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut⁷, yaitu:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), hlm. 177.

- i. Untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan maka dilakukan eliminer hal-hal yang tidak relevan serta mengidentifikasi fakta hukum yang ada;
- ii. Melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dan mempunyai hubungan dengan bahan non hukum;
- iii. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan;
- iv. Argumentasi yang telah dicantumkan atau dijelaskan dalam kesimpulan selanjutnya diberikan deskripsi.

Langkah yang dilakukan di atas sesuai dengan sifat terapan dan perspektif dari karakter ilmu hukum. Norma-norma hukum, konsep hukum, validitas aturan hukum dan nilai keadilan adalah tujuan mempelajari ilmu hukum sesuai dengan hukum yang bersifat perspektif. Melaksanakan aturan hukum, rambu-rambu, ketentuan serta untuk menerapkan standar prosedur adalah ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Kajian akademis maupun kebutuhan praktis penelitian ilmu hukum bisa menggunakan langkah-langkah tersebut

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata *Corrumpere*, suatu kata lain yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption*, *Corrupt*. Perancis yaitu *Corruption* dan Belanda *Corruptive (Korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

“Corruption {L. corruption (n-)} The act of corruption, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity;

corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement; as of a language; a debased form of a word” (The Lexicon 1978).⁸

Pengertian Advokat

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin- Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kerja yang berarti *to defend, to call one’s aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti:

“One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser ; plead for causes.”

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di pengadilan. Seorang asisten, penasihat atau pembicara untuk kasus kasus.⁹

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *Advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata Advokat itu sendiri berakar pada makna *Advocate* yaitu nasihat (*Adviser*), penasihat hukum (*Legal Adviser*).

Hak Imunitas Advokat

Profesi Advokat atau pengacara memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas Advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab

⁸ Terjemahan dari penjelasan Berbahasa Inggris “Korupsi {L. korupsi (n-)} Perbuatan korupsi, atau keadaan yang korup; dekomposisi pembusukan, materi busuk; penyimpangan moral; kejahatan; penyimpangan integritas; proses yang korup atau tidak jujur, penyuapan; penyimpangan dari keadaan suci; kehinaan; sebagai bahasa; bentuk kata yang direndahkan” (*The Lexicon 1978*).

⁹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

moral yang seimbang. Luhut MP Pangaribuan menjelaskan bahwa definisi Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (knowledge), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi.¹⁰

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.¹¹

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan Advokat bergantung dari itikad baik Advokat tersebut.¹²

¹⁰ Muhammad Khambali, “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas”, *Jurnal Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, Vol. XIV No. 01, (2017), hlm. 22.

¹¹HRS, “Hak Imunitas Advokat Memiliki Dua Batasan, Advokat Tidak Kebal Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan-lt536f64b5bde8c/>, diakses pada 08 Juli 2023.

¹²Angga Arya Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali Indonesia, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33657.2017>, diakses pada 03 Juli 2023.

Hak Imunitas (kekebalan hukum) pada Advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang hal tersebut terdapat dalam Pasal 50 KUHP dimana Pasal itu memuat tentang pengecualian hukum. Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh di hukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum.¹³

Obstruction Of Justice Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Obstruction Of Justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum (*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara khusus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU PTPK. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang mana berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.¹⁴

¹³ H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 71.

¹⁴ Arfiani, Syofirman Syofyan, Suci Delyarahmi, “Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, Issue 4, Januari, (2023), hlm. 518-519.

Perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 21 UU PTPK, tentang perbuatan atau tindakan yang menghalang-halangi proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka, terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Kedudukan Hukum Pelaku Perintangian Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan terkait *Obstruction of Justice* sudah ada dalam KUHP Pasal 221 Ayat (1) KUHP dan kemudian tindakan *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terdapat pergeseran sifat dari kedua pasal yang telah disebutkan diatas. Jika dilihat secara rinci, Pasal 221 KUHP bersifat tujuan. Artinya tindakan yang dilakukan seseorang seperti member pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan, menghilangkan barang bukti, bertujuan untuk menghalangin proses penyidikan. Tetapi, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu perbuatan. Sehingga terjadi pergeseran dari tujuan menjadi perbuatan.¹⁵

zedangkan dalam pembuatan Undang-Undang tersebut tidak diberikan penjelasan secara detail perihal kriteria apa saja yang termasuk dalam perbuatan menghalangi-halangi proses peradilan. Dalam rumusan Pasal 21 Undang-Undang Tindang Pidana Korupsi dalam bab penjelasan pasal tersebut hanya member istilah cukup jelas. Kemudian dalam profesi Advokat sudah diatur di Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang hak imunitas, yang berbunyi: “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam*

¹⁵Aji Prasetyo, “Pergeseran Sifat dalam Pasal *Obstruction of Justice*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice-1t5a71ebbd00dd7/>, diakses pada 09 Oktober 2023.

sidang pengadilan”.

Dalam pasal 16 terkait istilah “Iktikad Baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Penjelasan tersebut sebenarnya masih terlalu umum, tidak ada penjelasan yang lebih terperinci terkait hal tersebut. Namun ketika menggunakan penafsiran yang sistematis, mengacu pada pasal 6 dan pasal 15 UU Advokat, maka yang menjadi batasan iktikad baik adalah tidak bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah advokat, serta nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat. Apabila perilaku advokat bertentangan dengan kode etik yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka advokat tersebut termasuk tidak memiliki iktikad baik.

Terkait penjelasan perihal iktikad baik tersebut pertanyaanya kemudian siapa yang berwenang mengawasi dan memeriksa advokat tersebut beriktikad baik atau tidak, maka menurut penjelasan diatas seharusnya yang memiliki kewenangan tersebut adalah organisasi advokat atau dalam hal ini dewan kehormatan organisasi advokat. Undang-undang Advokat merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) tidak hanya menjamin hak-hak advokat sebagai penegak hukum, tetapi juga mengatur soal pengawasan dan penindakan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya.

Dalam pasal 1 huruf a Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia, mengatakan: “*Kode Etik Advokat Indonesia adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat, kode etik advokat yang disahkan tanggal 23 Mei 2022, keputusan peraturan dewan kehormatan*”. Dari penjelasan diatas apabila ada dugaan advokat melakukan pelanggaran kode etik dalam hal ini iktikad baik, seharusnya aparat penegak hukum yang bersangkutan mengadukannya terlebih dahulu kepada organisasi advokat atau dalam hal ini dewan kehormatan advokat dengan membawa 2 alat bukti yang cukup untuk diuji iktikad baik atau tidak. Apabila organisasi advokat memutuskan advokat yang bersangkutan tersebut telah melanggar kode etik dalam hal ini iktikad baik, maka hak imunitas advokat menjadi hilang dan sejak saat itulah hukum pidana dapat diterapkan kepadanya.

Hal tersebut pernah beberapa kali diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh organisasi advokat bahkan

individu, salah satunya adalah Peninjauan Kembali Nomor 7/PPU-XVI/2018 yang diajukan oleh salah seorang Advokat bernama Khaeruddin, S.H., S.Sy. Khaeruddin yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Menurut Pemohon, pasal *a quo* membuat profesi advokat terbelenggu guna menegakkan hukum dan keadilan kendati memiliki niat yang mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pemohon menilai pasal *a quo* mengakibatkan penafsiran subjektif oleh penegak hukum untuk dapat merintangangi atau menggagalkan, baik secara langsung atau tidak langsung tugas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan terhadap klien.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Sementara terkait hak imunitas advokat, Mahkamah Agung menjelaskan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*”, “*Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada ‘kepentingan pembelaan Klien’, melainkan pada ‘iktikad baik’*”, dalih Mahkamah. Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “iktikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki iktikad baik. “*Karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud*”.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Bahkan, menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat. Menurut Mahkamah, tolok ukur dimaksud sudah sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK), sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 UU Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada iktikad baik. “*Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah menjadi terang bahwa sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum*”.¹⁶

Dalam putusan dengan nomor 7/PPU-XVI/2018 tersebut, bisa dilihat bahwasannya Mahkamah Konstitusi lebih kepada tolok ukur yang digunakan adalah “Unsur Kesengajaan” sedangkan unsur kesengajaan ini tidak bisa kita prediksi apakah seorang advokat tersebut melakukan dengan sengaja atau spontanitas (tidak sengaja). Maka dari itu diperlukannya penjelasan detail dan lebih terperinci perihal apa-apa saja perbuatan yang termasuk dalam tindakan menghalangi-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*). Kalau belum ada kejelasan mengenai kriteria apa saja yang termasuk dalam *Obstruction of Justice* Maka hal tersebut bisa memberikan dampak kedudukan hukum pelaku *Obstruction of Justice* terutama yang dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi ambigu atau tidak jelas dimata hukum. Hal itulah yang mengakibatkan banyaknya advokat yang mengajukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali atas kasus yang menjerat mereka, hal tersebut disebabkan perbedaan persepsi atas “iktikad baik” atau bahkan “unsur kesengajaan” antara advokat, aparat penegak hukum, bahkan juga hakim.

Legislator yang menyusun ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, didasarkan atas Persepsi Korupsi tentang *Obstruction of Justice* berdasarkan sejumlah pengalaman hukum yang terjadi di masa lalu, pelaku yang memiliki kekuatan atau otoritas politik, bahkan memiliki kekayaan atau kekuatan materi, yang dapat melakukan tindakan menghalang-halangi dan merintang proses peradilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan

¹⁶Agus Sahbani, “*Begini Alasan MK Tolak Pasal Obstruction of Justice*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-tolak-pasal-obstruction-of-justice-1t5a96e5cde36a3/?page=2>, diakses pada 10 Oktober 2023.

disusunnya Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun lebih dari itu, rumusan undang-undang tersebut harus dirumuskan dengan jelas, karena tindak pidana korupsi tergolong tindak pidana khusus sehingga memerlukan undang-undang yang khusus.

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus/Tpk/2022/PN.Jmb Guna Memenuhi Unsur Keadilan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dan menentukan pelaksanaan nilai putusan hakim yang adil (*ex aequo et bono*) dan dapat dipertanggungjawabkan karena harus mengandung unsur keadilan didalamnya, menurut Aristoteles¹⁷ keadilan adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan, dan juga keadilan merupakan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan ada yang dilakukannya. Hal tersebut tentunya bisa menjadi landasan para hakim dalam tujuan tercapainya suatu keadilan. Sedangkan menurut Notonagoro¹⁸, keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga keadilan bisa tercapai asalkan semua pihak mengikuti aturan hukum yang ada, keteraturan dalam mentaati hukum mempunyai manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya yang terlibat, sehingga pendapat hakim akan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Berdasarkan hal tersebut salah satu faktor yang mempengaruhi putusan adalah faktor aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya. Terkadang dengan kasus yang sama hasil dari putusan bisa berbeda antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lainnya. Tidak terlepas pula dengan kasus *Obtruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini melibatkan Advokat.

Salah satu contohnya adalah kasus Avokat Lucas yang dibebaskan dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 yang diajukan oleh terpidana Advokat Lucas tersebut. Hakim mempunyai

¹⁷ Aristoteles, "Nicomachean Ethics", translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses tanggal 21 November 2023.

¹⁸ Aim Abdul Karim, *Kewarganegaraan*, (Bandung : Gravindo Media Pratama, 2006), hlm. 57-58.

pertimbangan terkait putusan Peninjauan Kembali yang membebaskannya dari segala tuntutan.

Putusan Hakim	Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA LUCAS tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019 tersebut; <p>MENGADILI KEMBALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana LUCAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (<i>vrijspraak</i>); 3. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar Terpidana dibebaskan seketika; 5. Memerintahkan Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa LUCAS.

Salah satu pertimbangan hakim yang paling menarik dari putusan Peninjauan Kembali Kasus Lucas tersebut adalah pertimbangan point pertama, yaitu Hakim melihat kata “Menyarankan” tidak sebagai faktor perintang proses peradilan hanya karena hal yang disarankan oleh Advokat Lucas kepada kliennya Eddy Sindoro tidak dilakukan maka hal tersebut dianggap tidak menimbulkan perbuatan nyata, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Bercermin dari kasus Advokat Lucas diatas, justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Advokat Tengku Ardiansyah, dalam kasus perkara Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jmb memutuskan bersalah atas kasus *Obtruction of Justice* dalam kasus korupsi anggaran KPU Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dimana Kliennya yaitu

Nurkholis menjabat sebagai ketua KPU.

Putusan Hakim	Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb
	<p>Memperhatikan, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,</p> <p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terdakwa Tengku Ardiansyah, S.H., M.H tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi</i>”;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan beberapa barang bukti yang terlampir pada putusan;5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah).

--	--

Dalam putusan tersebut hakim memberikan Advokat Tengku Ardiansyah hukuman 3 tahun penjara karena menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan. Putusan itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi dan dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Satu perkara yang menjerat Tengku Ardiansyah sebagai tersangka, karena dirinya menghalang-halangi proses penyidikan pihak Kejari Tanjung Jabung Timur, Terutama saat pemeriksaan saksi-saksi. Di mana Tengku Ardiansyah berperan mengatur skenario, menyarankan agar para saksi tidak hadir saat pemanggilan para saksi untuk pemeriksaan, Yakni, mulai dari menghalangi, tindakan tidak sopan, dan juga upaya membawa saksi saat pemeriksaan berlangsung.

Dari semua penjelasan diatas dapat dilihat pertimbangan hakim bisa berbeda dari kasus yang satu dengan kasus yang lainnya, tergantung dari sudut pandang hakim dalam memberikan pertimbangan yang nantinya akan mempengaruhi sebuah putusan. Pertimbangan hakim disini tidak memiliki unsur keadilan dikarenakan disparitas yang terjadi saat hakim melakukan pertimbangan hukum dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim perihal “menyarankan” bukan termasuk perintang proses peradilan (*Obstruction of Justice*) dikarekan tindakan tersebut belum dilakukan, disatu sisi ada pertimbangan hakim perihal “membujuk atau menyuruh” sudah tergolong dalam tindakan perintang proses peradilan (*Obstruction of Justice*).

Menurut Wiryono Kusumo¹⁹, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *Considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Sedangkan Menurut Mackenzie²⁰, terdapat teori pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangan penjatuhan putusan suatu perkara yakni teori pendekatan keilmuan, pendekatan keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata

¹⁹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

atas dasar intuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

Jadi Hakim tidak serta merta dapat membuat putusan hanya berdasarkan perasaan atau kemauan hakim sendiri. Akan tetapi bukan berarti Hakim tidak boleh menggali nilai-nilai hukum lain ketika Undang-Undang yang bersangkutan terasa samar dan tidak terperinci, asalkan keputusan yang dibuat bukan untuk tujuan atau kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dengan kata lain keputusan hakim harus bisa menciptakan kepastian hukum. Hal tersebut untuk menghindari dugaan-dugaan yang negatif atau konflik kepentingan diantara hakim dan para pihak yang berperkara.

Seharusnya terlepas apapun tindakan klien dari seorang Advokat entah itu sudah dilakukan atau tidak. Seharusnya hakim dalam melakukan pertimbangan hukum juga melihat dari sisi Psikologis, karena tindakan seseorang baik itu sudah terjadi atau belum terjadi atau bahkan tidak terjadi semua itu berawal salah satunya dari saran atau perintah. Dan ketika kita tarik kebelakang lagi terkait Kode Etik Advokat disitu sudah sangat jelas bahwasannya seorang Advokat harus mempunyai kejujuran dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kemudian dalam Pasal Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ada istilah Iktikad Baik, maksud dari Iktikad Baik menurut Undang-Undang tersebut dikatakan Iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya, disitu ada kalimat “berdasarkan hukum” jadi seharusnya hal-hal yang berupa saran atau perintah sejauh itu sudah melanggar hukum dan walaupun saran atau perintah tersebut sudah dilakukan atau tidak, hal tersebut sudah termasuk tindakan perintang proses peradilan (*Obstruction of Justice*).

Kemudian penjelasan diatas seakan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 7/PPU-XVI/2018 yang secara garis besar Menurut Mahkamah Konstitusi, tolok ukur dimaksud sudah sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK), sehingga misalkan dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 Undang-Undang Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada iktikad baik. Jadi iktikad baik bisa gugur ketika ada

tindakan yang disengaja, dalam hal ini juga seharusnya berlaku pada sebuah “Saran, bujukan atau bahkan Perintah”, ketika saran, bujukan atau perintah tersebut dilakukan dengan sengaja demi niat tertentu yang bertujuan untuk menghalangi atau merintangangi proses peradilan maka secara jelas Advokat tersebut tidak memiliki Iktikad Baik.

Dengan melihat beberapa kasus bisa dikatakan bahwa hal seperti ini terkadang luput atau sengaja dikesampingkan oleh hakim ketika proses pertimbangan dalam sebuah pembuatan putusan. Sehingga dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN.Jmb belum memenuhi unsur keadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan *Obstruction of Justice* memiliki arti lain dari Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu kepada seseorang yang memberikan ide, nasihat, pendapat, pertimbangan, saran atau bahkan perintah kepada pelaku tindak pidana yang sedang menjalani proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dalam persidangan, yang memiliki tujuan guna menghindari dari jerat hukum yang sedang dihadapi. Kedudukan *Obstruction of Justice* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tercantumnya aturan hukum *Obstruction of Justice* dalam peraturan perundang-undangan, maka kedudukan *Obstruction of Justice* sangat jelas dan mampu memberikan sanksi pidana yang sesuai kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Ada tiga unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana *Obstruction of Justice*, yaitu: *Pertama*, Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*). *Kedua*, Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*). *Ketiga*, Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*). Kedudukan hukum seorang advokat yang diduga melakukan perintangangan proses peradilan (*Obstruction of Justice*) jika perbuatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan

tugas profesinya dan tidak didasari oleh “Iktikad Baik” yang kemudian dibarengi dengan unsur “Kesengajaan”, tanpa disadari hal tersebut membuat ketidakjelasan dimata hukum, karena frasa “Iktikad Baik” dan “Kesengajaan” sering kali beda pengertian dan pemahaman diantara para hakim. Iktikad Baik tersebut didasari pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Hak Imunitas Advokat, adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/Tpk/2022/PN.Jmb, dengan dakwaan menghalang-halangi proses penyidikan pihak Kejari Tanjung Jabung Timur, terutama saat pemeriksaan saksi-saksi, dimana Tengku Ardiansyah berperan mengatur skenario, agar para saksi tidak hadir saat pemanggilan para saksi untuk pemeriksaan, yakni mulai dari menghalangi, tindakan tidak sopan, dan juga upaya membawa saksi saat pemeriksaan sedang berlangsung. Pertimbangan hakim disini tidak memiliki unsur keadilan dikarenakan disparitas yang terjadi saat hakim melakukan pertimbangan hukum dalam membuat suatu putusan jika dibandingkan terhadap putusan lainnya dengan kasus yang sama. Memberikan hukuman 3 tahun merupakan putusan yang kurang tepat dan belum memenuhi unsur keadilan, harusnya Hakim bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantara Putusan Hakim Terdahulu (*Yurisprudensi*) yang membebaskan tersangkan *Obstruction of Justice* dengan kasus yang serupa. Dikarenakan tidak adanya kejelasan atau batasan-batasan perihal tindakan apa saja yang termasuk dalam *Obstruction of Justice*. Hal tersebut menghilangkan makna tujuan filosofis dan historis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian aspek sosiologis yakni dikesampingkannya tujuan dan manfaat hukum dalam pencegahan *Obstruction of Justice*. Sehingga hal tersebut belum memberikan unsur keadilan bagi Advokat yang terikat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

b. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengatasi hambatan dalam mencapai keadilan, khususnya dalam kasus korupsi harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, cermat

dan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangannya individu, sehingga tujuan hukum dapat menjamin kepastian dan keadilan, dalam menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus berhati-hati dan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut, yang menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai penghambat proses peradilan (*Obstruction of Justice*) atau tidak dalam suatu perkara korupsi. Karena pasal ini merupakan pasal yang sangat sensitif, sehingga harus berhati-hati dalam penerapannya agar tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik.

Bahwa dalam pembuatan Undang-Undang khususnya mengenai rumusan pasal berkaitan Perintangannya Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seharusnya bisa lebih terperinci dan spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir dan terciptanya kesepahaman bersama antara aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa dan Advokat terkait jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam *Obstruction of Justice* yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena kejahatan Korupsi termasuk kejahatan luar biasa, maka perlu dibuatkan aturan-aturan yang luar biasa juga

DAFTAR PUSTAKA

- Sajipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, (Medan: Usu

- Press, 2010).
- Aim Abdul Karim, *Kewarganegaraan*, (Bandung : Gravindo Media Pratama, 2006).
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Allivia Putri Gandini, “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).
- Muhammad Khambali, “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas”, *Jurnal Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, Vol. XIV No. 01, (2017).
- Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, “Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, Issue 4, Januari, (2023).
- HRS, “Hak Imunitas Advokat Memiliki Dua Batasan, Advokat Tidak Kebal Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan-lt536f64b5bde8c/>, diakses pada 08 Juli 2023.
- Angga Arya Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali Indonesia, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33657,2017>, diakses pada 03 Juli 2023.
- Aji Prasetyo, “Pergeseran Sifat dalam Pasal *Obstruction of Justice*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice-lt5a71ebbd00dd7/>, diakses pada 09 Oktober 2023.
- Agus Sahbani, “Begini Alasan MK Tolak Pasal *Obstruction of Justice*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-tolak-pasal-obstruction-of-justice-lt5a96e5cde36a3/?page=2>, diakses pada 10 Oktober 2023.
- Aristoteles, “Nicomachean Ethics”, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/>

[pag/Aristoteles-nicomachaen.html](#). diakses tanggal 21 November 2023.